

BAB 5 PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kondisi transportasi DKI Jakarta pada saat ini memiliki sejumlah masalah, baik teknis maupun manajerial. Masalah teknis diantaranya adalah sempitnya lebar jalan, sistem transportasi yang terlalu bergantung pada jalan, rendahnya jaringan antarmoda kendaraan. Masalah manajerial diantaranya adalah lemahnya koordinasi antardinas, masih berlakunya sistem setoran dalam manajemen keuangan perusahaan angkutan umum, kebijakan transportasi yang tidak komprehensif, dan persoalan komutasi yang tinggi. Sementara pada sisi pengguna, juga terjadi kecenderungan penggunaan kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum. Di luar itu, DKI juga memiliki kekuatan pada telah dibangunnya *Bus Rapid Transit (BRT)* sebagai moda transportasi publik modern yang dapat membangun jaringan yang lebih baik, jaringan jalan yang telah terbentuk, dan sudah ada jaringan rel yang cukup.
2. Kondisi transportasi DKI Jakarta tidak lepas dari pengaruh kekuatan di luar teknik transportasi sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, kekuatan yang paling berpengaruh adalah politik-birokrasi dan ekonomi. Kedua kekuatan pendorong ini akan membentuk empat skenario besar dalam transportasi, yaitu skenario *megalopolitan*, *berjalan lambat*, *namun selamat*, *berkah kota sekitar*, dan *menuju nekropolis*. Keempat skenario ini dapat dilihat sebagai kontinum yang harus dijaga oleh pemerintah DKI Jakarta. Terdapat sejumlah langkah yang harus dilakukan untuk menjaga keseimbangan kontinum tersebut, yang telah dirumuskan pada penelitian ini, diantaranya adalah *transit improvement*, *transportation demand management (TDM)*, dan *transit-oriented development*. Langkah-langkah ini perlu dilakukan bertahap dan melalui perencanaan yang komprehensif.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan sejumlah data yang telah penulis dapatkan, berikut adalah rekomendasi yang dapat penulis berikan.

1. Kepada pemerintah DKI Jakarta, agar segera melakukan manajemen angkutan umum melalui penghapusan sistem setoran, renegotiasi kontrak operator BRT agar dapat memenuhi kebutuhan, dan melembagakan *public transit authority* sebagai bentuk kontrol kualitas pada angkutan umum. Pemerintah DKI Jakarta juga perlu melakukan penelusuran lebih lanjut pada faktor sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat untuk dapat memberlakukan modernisasi transportasi kota dan penerapan *Transportation Demand Management* (TDM) di masa yang akan datang.
2. Kepada pengusaha angkutan umum, agar secepatnya melakukan reformasi sistem setoran dan integrasi pembayaran antarmoda.
3. Kepada masyarakat, agar memahami dan menerima fakta bahwa penggunaan kendaraan pribadi untuk kebutuhan sehari-hari akan berdampak pada kemacetan lalu lintas, yang tidak saja merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan orang lain dan generasi selanjutnya. Isu kemacetan bukan hanya merugikan dalam arti biaya hidup sehari-hari, namun juga terdapat biaya sosial dan kesehatan yang harus ditanggung, sehingga penggunaan angkutan umum menjadi sangat penting, terlebih pada dunia yang sedang diterpa dengan isu pemanasan global. LSM yang terkait dengan lingkungan dapat turut membantu mensosialisasikan masalah ini pula. Masyarakat (terutama penduduk DKI Jakarta) juga dapat melakukan kontrol yang lebih ketat pada penyediaan angkutan umum di DKI Jakarta, karena sudah menjadi kewajiban pemerintah kota melakukan penyediaan pelayanan yang baik sebagai bagian dari otonomi daerah dan otonomi khusus DKI Jakarta.